

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kecanggihan Teknologi Informasi

2.1.1.1 Pengertian Kecanggihan Teknologi Informasi

Teknologi informasi mengandung dua kata teknologi dan informasi, yang masing-masing artinya berbeda satu dengan yang lain saat ini teknologi informasi telah menjadi satu makna. Walaupun demikian arti teknologi adalah suatu alat yang mampu untuk mempermudah atau memperlancar suatu pekerjaan. Alat dalam suatu teknologi dapat berupa perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras dapat berupa mesin, alat komputer dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat lunak dapat berupa software maupun prosedur-prosedur atau aturan-aturan yang ada (Aziz,2012:2)

Teknologi informasi meliputi teknologi komputer (*computing technology*) dan teknologi komunikasi (*communication technology*) yang digunakan untuk memproses dan menyebarkan informasi baik itu yang bersifat finansial atau non finansial. Sehingga dapat dikatakan bahwa Teknologi informasi adalah segala cara atau alat yang terintegrasi yang digunakan untuk menjaring data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya (Rahmawati, 2008:2)

Menurut Williams dan Sawyer (2007:3) Teknologi Informasi didefinisikan sebagai teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi

kecepatan tinggi, yang membawa data, suara, dan video. Definisi ini memperlihatkan bahwa dalam teknologi informasi pada dasarnya terdapat dua komponen utama yaitu teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Teknologi komputer yaitu teknologi yang berhubungan dengan komputer termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer. Sedangkan teknologi komunikasi yaitu teknologi yang berhubungan perangkat komunikasi jarak jauh, seperti telepon, faksimili dan televisi.

Menurut Raymond & Pare (2014:57) Kecanggihan teknologi informasi sebagai multi-dimensi yang mengacu pada sifat, kompleksitas dan interdependensi penggunaan teknologi informasi dan manajemen dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, konsep kecanggihan teknologi informasi mengintegrasikan kedua aspek yang berkaitan dengan menggunakan sistem informasi dan sistem informasi manajemen. Menurut Ellitan dan Anataan (2009:14) Kecanggihan teknologi informasi bila diaplikasikan pada rantai aktivitas akan menghasilkan produk yang memiliki nilai tinggi. Menurut Raymond dan Pare (dalam Cragg *et al.*, 2010) mendefinisikan bahwa kecanggihan teknologi informasi sebagai suatu konstruksi yang mengacu pada penggunaan alam, kompleksitas dan saling ketergantungan teknologi informasi dan manajemen dalam suatu organisasi.

Dari beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kecanggihan teknologi informasi adalah suatu konstruksi yang mengacu pada penggunaan alam, kompleksitas dan saling ketergantungan teknologi informasi dan manajemen yang mampu menghasilkan beraneka ragam teknologi informasi dan manajemen yang mampu menghasilkan beraneka ragam teknologi

sistem, dirancang untuk membantu pekerjaan manusia dalam menghasilkan kualitas informasi. Perusahaan yang memiliki teknologi informasi yang canggih (terkomputerisasi dan terintegritas) dan didukung oleh aplikasi pendukung teknologi modern, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan perusahaan dengan menghasilkan kualitas informasi akuntansi yang tepat waktu, akurat dan dapat dipercaya.

2.1.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Kecanggihan Teknologi Informasi

Menurut Thomson *et al.*, (1991:110) Faktor-Faktor yang mempengaruhi kecanggihan teknologi informasi adalah :

1. Faktor Sosial

Merupakan internalisasi kultur subyektif kelompok dan persetujuan interpersonal tertentu yang dibuat individual dengan yang lain, dalam situasi social tertentu.

2. Perasaan Individu

Perasaan individu dapat diartikan bagaimana perasaan individu atas pekerjaan yang dilakukan, apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan, rasa suka atau tidak suka dalam melakukan dan penyelesaian tugas pekerjaan individu dengan menggunakan teknologi informasi.

3. Kompleksitas

Kompleksitas didefinisikan sebagai tingkat inovasi yang dipersiapkan suatu yang relative sulit untuk dimengerti dan digunakan

4. Kesesuaian Tugas

Kesesuaian tugas dengan teknologi dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik-karakteristik individu pemakai, teknologi yang digunakan dan tugas yang berbasis teknologi.

5. Konsekuensi Jangka Panjang

Konsekuensi jangka panjang dilihat dari output yang dihasilkan apakah pengguna dapat merasakan keuntungan dimasa yang akan datang, seperti peningkatan fleksibilitas dalam perubahan pekerjaan atau meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

1.1.1.3 Fungsi dan Tujuan Teknologi Informasi

Menurut (Sutarman, 2012:8) Tujuan dari teknologi Informasi yaitu :

1. Sebagai solusi atas permasalahan

Setiap permasalahan akan terselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi. Misal permasalahan terkait lambatnya produktivitas dan pengolahan data, dapat diselesaikan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

2. Memberikan inspirasi kreativitas

Dengan adanya teknologi informasi, tidak ada lagi batasan. Dapat meningkatkan kreativitas dan memberikan inspirasi berdasarkan informasi yang didapatkan. Misal desain pakaian, akan banyak referensi yang tersedia dengan mengakses teknologi informasi

3. Pekerjaan lebih efektif dan efisien

Teknologi informasi menjadikan kinerja lebih efektif dan efisien karena

memudahkan penggunaannya dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan.

Berikutnya Fungsi dari teknologi informasi yaitu (Sutarman, 2012:9) :

1. Menangkap (*capture*)

Mempersiapkan data yang akan diolah ke bentuk informasi. Salah satu cara untuk mendapatkan data yang akan diolah yakni dengan proses menangkap atau capture

2. Mengolah (*processing*)

Langkah *processing* atau mengolah dapat di definisikan dalam beberapa langkah, antara lain :

- a. Kombinasikan langkah rinci dan kegiatan, seperti menerima masukan dari *keyboard*, *scanner*, dan perangkat lain.
- b. Memproses data masukan yang akan diolah ke bentuk informasi yang berkualitas. Pengolahan dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk yang lain), analisis (menganalisis kondisi), perhitungan (melakukan kalkulasi), sintesis (melakukan penggabungan) seluruh data informasi.

3. Membuat

Membuat atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya laporan, tabel, grafik dan sebagainya.

4. Penyimpanan

Merekam atau menyimpan data dan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Misalnya laporan, tabel, grafik, dan sebagainya.

5. Melakukan penelusuran

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (copy) data dan informasi yang sudah tersimpan.

6. Perpindahan

Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer.

1.1.1.4 Keuntungan Menerapkan Teknologi Informasi

Banyak keuntungan yang akan didapatkan ketika menerapkan teknologi informasi. Keuntungan dapat diperoleh ketika dipergunakan dibidang pemasaran, keuangan, manajemen, perbankan, administrasi umum, ekonomi, bisnis, akuntansi, akuntansi manajemen, dan bidang audit. Tidak tertutup pula apabila di pergunakan dibidang yang lain. Adapun keuntungan menerapkan teknologi informasi yaitu (Maflikhah, 2010:10) :

1. Kecepatan (*speed*)

Teknologi informasi dapat melakukan pengerjaan perhitungan yang rumit dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari manusia. Tak hanya melakukan perhitungan tetapi juga dapat melakukan aktivitas lain dengan sangat cepat dan akurat.

2. Konsistensi (*Consistency*)

Hasil pengolahan dengan teknologi informasi sangat konsisten dan tidak beubah-ubah karean bentuknya yang sudah distandarkan, meski

telah dilakukan berulang kali, berbeda dengan manusia yang sangat sulit menghasilkan yang persis sama.

3. Ketepatan (*Precision*)

Teknologi informasi tidak hanya cepat, namun juga akurat, berkualitas, dan tepat. Teknologi informasi dapat mendeteksi perbedaan yang sangat kecil secara detail, yang tidak dapat dilihat manusia, dapat diselesaikan dengan cepat dengan adanya teknologi informasi, dalam hal proses juga terlihat ketepatan yang baik dan akurat.

4. Keandalan (*Reliability*)

Teknologi informasi menghasilkan keandalan yang dapat lebih dipercaya di bandingkan dengan dilakukan oleh manusia. Karena kesalahan lebih kecil kemungkinannya dengan menggunakan teknologi informasi. Aplikasi yang ada di teknologi informasi sudah mampu mengkoordinir banyak hal. Tinggal dimanfaatkan dengan tepat sesuai dengan kebutuhannya.

Keuntungan yang lebih besar karena menggunakan teknologi informasi akan lebih besar lagi didapatkan ketika teknologi itu dimanfaatkan dengan maksimal. Dengan kata lain, teknologi informasi dimaksimalkan kinerjanya, sesuai dengan bidang-bidang yang ingin diselesaikan dengan menggunakan teknologi informasi. Ada dua indikator yakni memaksimalkan manfaat dan efektivitas.

Memaksimalkan manfaat sebagai berikut :

1. Menjadikan pekerjaan lebih mudah

2. Memberikan nilai manfaat yang lebih besar
3. Meningkatkan produktivitas

Sedangkan untuk indikator efektivitas sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas
2. Menjadikan pekerjaan lebih kreatif dan berkembang

Dengan demikian semakin jelas jika teknologi informasi memberikan dampak yang positif bagi penggunanya. Dampak positif tersebut akan semakin terlihat dan dirasakan ketika pengguna teknologi informasi mampu mengeksplorasi teknologi informasi tersebut dengan maksimal, sesuai dengan kebutuhan bidang yang ingin dikerjakan.

2.1.2 Sistem Pengendalian Internal

2.1.2.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomer 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian *intern* Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa suatu sistem pengendalian *intern* yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Berkaitan dengan hal ini, presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian *intern* di bidang perbendaharaan, Menteri/Pimpinan lembaga selaku penggunaan anggaran/pemgunaan barang menyelenggarakan sistem pengendalian *intern* di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur, /Bupati/Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian *intern* di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan Negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengadilan atas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan pedoman pada SPIP sebagai mana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1, Pengertian SPIP adalah

“ Sistem Pengendalian *intern* Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

Perkembangan SPIP

1. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
3. Keputusan Menteri PAN No. 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat yang diperbaharui dengan keputusan Menteri PAN No. KEP/46 M.PAN/2004: Unsur-unsur Waskat adalah : Pengorganisasian; Personil; Kebijakan; Perencanaan; Prosedur; Pencatatan; Pelaporan; dan Reviu Intern.

4. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dasar Hukum SPIP

Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :

- Pasal 55 ayat (4) : Mentri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/ pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Pasal 58 ayat (1) DAN (2) : dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, Presiden selaku kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. Sistem Pengendalian Intern ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.1.2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Tujuan adanya sisitem pengendalian internal pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Keandalan pelaporan keuangan.
3. Pengamanan asset negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal

Pada unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008

Pasal 3 ayat (1) dan (2) terdiri dari :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi, dan
5. Pemantauan Pengendalian Intern

Unsur-unsur Pengendalian Intern tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Kondisi dalam Instansi Pemerintahan yang mempengaruhi efektivitas pengendalian *intern*. Unsur ini menekankan bahwa pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara keseluruhan lingkungan organisasi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan mendukung pengendalian *intern* dan manajemen yang sehat, diantaranya :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika, meliputi :
 - a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku

- b. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkatan pimpinan Instansi Pemerintah
- c. Menegakan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku.
- d. Menjelaskan dan mempertanggung jawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian *intern*
- e. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

2) Komitmen terhadap kompetensi, meliputi :

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
- b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah.
- c. Menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
- d. Memilih pimpinan Instansi yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah

3) Kepemimpinan yang kondusif, meliputi :

- a. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan
 - b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja
 - c. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP
 - d. Melindungi atas asset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah
 - e. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah
 - f. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, meliputi :
- a. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah
 - b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab dalam Instansi Pemerintah
 - c. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan interen dalam Instansi Pemerintah
 - d. Melakukan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis
 - e. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai, terutama untuk posisi pimpinan
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, meliputi :

- a. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah
 - b. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan
 - c. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, meliputi :
- a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai
 - b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen
 - c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai
- 7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern Pemerintah yang efektif, meliputi :
- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
 - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah
 - c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah

- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait, diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah.

2. Penilaian resiko

Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintahan. Unsur ini memberikan penekanan bahwa pengendalian *intern* harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam, diantaranya :

1) Identifikasi risiko, meliputi :

- a. Menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintahan dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif
- b. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari factor eksternal dan factor internal
- c. Menilai factor lain yang dapat meningkatkan resiko

2) Analisa risiko

Dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah didefinisikan terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah

3. Kegiatan Pengendalian

Tindakan yang diperlakukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Unsur ini menekankan

bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan, diantaranya :

- 1) Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dengan membandingkan kinerja dengan tolak ukur kinerja ditetapkan.
- 2) Pembinaan sumber daya manusia, meliputi :
 - a. Mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, nilai dan strategi Instansi kepada pegawai
 - b. Membuat strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya manusia yang mendukung pencapaian visi dan misi
 - c. Membuat uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai, sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir
- 3) Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, meliputi :
 - a. Pelaksanaan penilaian resiko secara periodik yang komprehensif
 - b. Pengembangan rencana yang secara jelas menggambarkan program pengamanan serta kebijakan dan prosedur yang mendukungnya
 - c. Penetapan organisasi untuk mengimplementasikan dan mengelola program pengamanan
 - d. Penguraian tanggung jawab pengamanan secara jelas
 - e. Implementasi kebijakan yang efektif atas sumber daya manusia terkait dengan program pengaman

- f. Pemantauan efektivitas program pengamanan dan melakukan perubahan program pengamanan jika diperlukan
- 4) Pengendalian fisik atas asset, meliputi :
 - a. Rencana identifikasi, kebijakan dan prosedur pengamanan fisik
 - b. Rencana pemulihan setelah bencana
 - 5) Penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinerja, meliputi :
 - a. Menetapkan ukuran dan indicator kinerja
 - b. Mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja
 - c. Mengevaluasi faktor penilaian pengukuran kinerja
 - d. Membandingkan secara terus-menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut
 - 6) Pemisahan fungsi, menetapkan pimpinan Instansi Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang
 - 7) Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, dalam melakukan otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, pimpinan Instansi pemerintahan wajib menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada seluruh pegawai.
 - 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, meliputi :
 - a. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat segera

- b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan dalam seluruh siklus transaksi atau kejadian
- 9) Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. Dalam melaksanakan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan tersebut secara berkala
 - 10) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dalam menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, pimpinan Instansi Pemerintah wajib menugaskan pegawai yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala
 - 11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik, pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutaakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting
 - 12) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Dalam menyelenggarakan dokumentasi yang baik, pimpinan Instansi Pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara dan secara berkala memutaakhirkan

dokumentasi yang mencakup seluruh Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, sedangkan komunikasi adalah proses penyimpanan pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan baik, diantaranya :

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- 2) Mengelola, mengembangkan dan memperbarui Sistem Informasi secara

Terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pada dasarnya untuk memastikan apakah sistem pengendalian *intern* pada suatu instansi Pemerintah telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan, diantaranya :

- 1) Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan *intern* pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pemerintah

- 2) Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

2.1.3 Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

2.1.3.1 Efektivitas

Efektivitas adalah kesuksesan harapan atas hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang telah dilakukan (Kristiani 2012:4). Menurut Siagaan (2012:74) efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Sedangkan menurut Abdul Halim (2010:6) efektivitas suatu sistem yang merupakan seberapa jauh sistem tersebut mencapai sasaran-sasarannya serta untuk mengevaluasi proses pengembangan sistem tersebut.

Berdasarkan pernyataan pakar diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran sejauh mana sesuatu dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

2.1.3.2 Sistem

Pengertian sistem menurut Jogianto (2005: 2) mengemukakan bahwa sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata adalah suatu objek nyata, seperti tempat, beda, dan orang-orang yang betul-betul ada dan terjadi. Sedangkan menurut Indrajit (2001: 2)

mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lainnya. Sistem adalah sekelompok dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama (Hall. 2019: 6). Sedangkan menurut Baridwan (2009:3) Sistem adalah suatu kerangka kerja atas prosedur yang saling berhubungan yang disusun menurut rencana komprehensif untuk melaksanakan kegiatan atau fungsi utama perusahaan. Prosedur adalah rangkaian dokumen (juru tulis), biasanya melibatkan banyak orang dalam satu atau lebih bagian, untuk memastikan keseragaman pemrosesan transaksi perusahaan yang terjadi.

Berdasarkan pernyataan pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah suatu kesatuan dari beberapa unsur yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian-bagian yang saling berhubungan dalam suatu sistem tersebut sebagai sub sistem. Sekelompok dari dua atau lebih sub sistem yang mempunyai hubungan dan memiliki suatu tujuan yang sama. Sub sistem tersebut berinteraksi melalui komunikasi yang baik sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien.

2.1.3.3 Informasi

Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan yang diolah menjadi bermakna, dan bernilai dan sesuai untuk tujuan tertentu (Bodnar & Hopwood 2013: 24). Informasi merupakan sekumpulan data yang diolah dan nantinya dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat dan akurat (Suryawarman dan Widhayani

2013). Sedangkan menurut (Raymond Mcleod 2021:5) informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna bagi penerimanya dan berguna untuk pengambilan keputusan saat ini atau dimasa depan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan sekumpulan fakta-fakta yang telah diolah menjadi bentuk data, sehingga dapat menjadi lebih berguna dan dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan sebagai pengetahuan ataupun dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.3.4 Akuntansi

Menurut Keputusan Menteri Keuangan RI (NO. 476 KMK.01 1991), Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Firdaus A. Dunia (2013) Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang memberikan laporan kepada berbagai pemakai atau pembuat keputusan mengenai aktivitas bisnis dari kesatuan ekonomi (perusahaan atau badan usaha). Menurut Abubakar. A & Wibowo (2004:2) Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas/perusahaan.

Berdasarkan pernyataan pakar diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sistem informasi yang melakukan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penyimpanan data dan pelaporan atas transaksi bisnis (keuangan) dari

suatu organisasi sehingga dapat memberikan informasi akuntansi yang berguna bagi pihak yang berkepentingan yang berfokus pada peristiwa masa depan.

2.1.3.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem dimana mampu mengolah data transaksi bisnis menjadi informasi keuangan untuk keperluan para pemakainya (Jogiyanto, 2019 : 227). Sedangkan menurut (Stephen A. Moscovice, op.cit : 6) sistem informasi akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan kepada pihak yang diluar perusahaan (seperti kantor pajak, investor, dan kreditor) dan pihak intern terutama manajemen. Menurut (Bodnar dan William S. Hopwood, 2010 : 17) Sistem Informasi akuntansi merupakan sumber daya, misalnya manusia dan prasarana yang didesain dalam mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi sebuah informasi. Sedangkan menurut (Romney and Paul Jhon Steinbart, 2006 : 17) Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang menghimpun, mencatatkan, membenahi dan mengubah data sebagai informasi bermanfaat dalam mendukung pengambilan keputusan. Menurut (Nugroho Widjajanto, 2001 : 17) Sistem informasi akuntansi adalah susunan formulir, catatan, alat-alat meliputi computer dan peralatannya serta sarana komunikasi, upaya pengerjaannya dan laporan yang terorganisir dengan baik yang dibentuk untuk menjadikan data keuangan sebagai informasi yang diperlukan manajemen.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan sistem informasi akuntansi adalah suatu kerangka kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan serta melibatkan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang saling bekerja sama untuk mengolah data ekonomi kedalam bentuk informasi keuangan yang dapat digunakan bagi perusahaan dan instansi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan.

2.1.3.6 Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Efektivitas menurut Azhar Susanto (2013:39) adalah sebagai berikut: “Efektivitas artinya informasi harus sesuai dan secara lengkap mendukung kebutuhan pemakai dalam mendukung proses bisnis dan tugas pengguna serta disajikan dalam waktu dan format yang tepat, konsisten dengan format sebelumnya sehingga mudah dimengerti ”. Azhar Susanto (2013:72) juga menjelaskan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut: “Sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integarsi) dari sub-sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.”. Menurut pemendagri no 13 tahun 2006 dalam Abdul Halim (2010: 26) efektivitas suatu sistem merupakan seberapa jauh sistem tersebut mencapai sasaran-sasarannya serta untuk mengevaluasi proses pengembangan sistem tersebut. Sedangkan menurut Siagaan (2012: 74) efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Sedangkan

menurut Kadek Indah & I Gusti AS (2014) efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu keberhasilan yang dicapai oleh sistem informasi akuntansi dalam menghasilkan sistem informasi secara tepat waktu, akurat dan dapat dipercaya. Menurut Handoko, (2003:8) efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran sejauh mana target dapat dicapai dari suatu kumpulan sumber daya yang diatur untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data elektronik, kemudian mengubahnya menjadi suatu informasi yang berguna serta menyediakan laporan formal yang dibutuhkan dengan baik secara kualitas maupun waktu. Sistem informasi dikatakan efektif bila sistem informasi yang diberikan oleh sistem tersebut dapat melayani kebutuhan pengguna sistem.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas sistem informasi akuntansi merupakan suatu hasil yang memberikan gambaran sejauh mana target atau tujuan dapat dicapai dengan baik secara kualitas maupun waktu, yang berorientasi pada keluaran (*output*).

2.1.3.7 Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Kouser, *et al* (2011) menyatakan bahwa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi diantaranya :

1. Pengetahuan Manager Akuntansi (*Manager Accounting Knowledge*)

Memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai merupakan komponen terpenting bagi seorang manajer akuntansi. Menjadi orang yang paling memahami operasi bisnis perusahaan, para manajer dapat memanfaatkan pengetahuan akuntansi untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi bisnis,

dan mungkin dengan bantuan vendor berkualitas dan efektif, akan mampu memilih teknologi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

2. Partisipasi Manajer dalam Pelaksanaan SIA (*Manager Participation in AIS Implementitation*)

Manajer harus terlibat dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi akuntansi serta memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang bisnis agar terhindar dari ketidak efektifan bagi perusahaan.

2.1.3.8 Indikator Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi dapat dikatakan efektif jika sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu (*timeliness*), akurat (*accurate*), dan dapat dipercaya (*reliable*) (widjajanto, 2008:24)

1. Akurat (*accurate*)

Menurut Harrison, et al (2015:52), akurat adalah ukuran kedekatan hasil pengujian dengan nilai sebenarnya. Harrison, R. G. (2015) *Bioseparatons Science and Engineering. United Kingdom:Oxford University. Evans* (2004:100), mendefinisikan bahwa akurasi adalah ukuran seberapa dekat hasil yang diamati dengan nilai benar atau yang sesungguhnya. Evans, G. (2004:73). *A Handbook of Bioanalysis and Drug Metabolism, USA: CRC Press.* Saunders (2014:19), juga mengungkapkan bahwa Akurasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seberapa dekat dengan nilai sebenarnya suatu pengukuran. Semakin akurat pengukuran, semakin dekat ke nilai sebenarnya. Saunders, M. M. (2014). *Mechanical Testing for the*

Biomechanic Engineer: A Paractical Guide. USA: Morgan & Claypool Publisher.

Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan oleh beberapa ahli mengenai definisi akurasi (*accuracy*), dapat disintesisakan bahwa akurasi adalah ukuran seberapa dekat hasil pengujian yang diamati dengan nilai yang sebenarnya. Semakin akurat sebuah pengukuran, maka semakin dekat dengan nilai yang sebenarnya. Akurat (*accuracy*)

2. Ketepatan Waktu (*timelines*)

Menurut Hunter (2009:136), mendefinisikan bahwa ketepatan waktu mengukur sebuah keterlambatan antara perubahan dalam kondisi sebenarnya dan pembaruan data yang sesuai. (Hunter, M. G. (2009) *Selected Readings in Strategic Information Systems, USA:IGI Global.*

Menurut Tayal, et al (2008:95), ketepatan waktu adalah kualitas terkait proses yang mengacu pada kemampuan untuk mengirimkan informasi dengan waktu yang tepat atau sesuai ketepatan waktu. Tayal, S. (2008). *Software Engineering & Testing. United Kingdom: Jones ad Bartlett Publisher.* Hal yang selaras juga diungkapkan oleh Loshin (2010:92), yang mengungkapkan bahwa ketepatan waktu mengacu pada ekspektasi waktu untuk aksesibilitas dan ketersediaan informasi. Ketepatan waktu dapat diukur sebagai jarak waktu antara kapan informasi diharapkan dan kapan informasi itu tersedia untuk digunakan. Loshin, D. (2010) *Master Data Management, USA: Morgan Kaufman.*

Dari beberapa definisi mengenai ketepatan waktu (*timeliness*) oleh beberapa ahli, dapat disintesakan bahwa ketepatan waktu merupakan ukuran sebuah informasi dapat dikirimkan dengan waktu yang tepat atau sesuai dan dapat diukur dengan jarak waktu antara kapan informasi diharapkan dan juga kapan sebuah informasi itu tersedia untuk bisa digunakan.

3. Keandalan (*reliability*)

Menurut Rubin (2009:82), mengungkapkan bahwa keandalan adalah masalah apakah teknik tertentu diterapkan berulang kali pada objek yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama setiap kali. Menurut Ember (2009:153), mendefinisikan bahwa keandalan mengacu pada konsistensi atau stabilitas dalam pengukuran.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dunia pada saat ini sudah menggunakan banyak perangkat teknologi untuk menghasilkan informasi yang optimal. Dengan perangkat teknologi informasi pekerjaan semakin mudah untuk dilakukan . Teknologi Informasi mengandung dua kata teknologi dan informasi, yang masing masing artinya berbeda satu dengan yang lain saat ini teknologi informasi telah menjadi satu makna. Walaupun demikian arti teknologi adalah suatu alat yang mampu untuk mempermudah atau memperlancar suatu pekerjaan. Alat dalam suatu teknologi dapat berupa perangkat, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras dapat berupa mesin, alat, komputer dan lain sebagainya. Sedangkan perangkat lunak dapat berupa software maupun prosedur-prosedur atau aturan-

aturan yang ada (Aziz 2:2012). Menurut Tata Sutabir (2014:3) Teknologi Informasi adalah sebagai Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu yang akan digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintah serta menerapkan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, suatu informasi akuntansi agar dapat efektif jika kecanggihan teknologi informasi tersebut optimal baik dari segi perangkat keras (*Hardware*) dan Perangkat Lunak (*Software*). Karena semakin baik kecanggihan teknologi informasi maka semakin baik pula efektivitas sistem informasi pada perusahaan (Dwitrayani, et al, 2017:24). Menurut Ekayani dkk, (2005) Kecanggihan Teknologi Informasi adalah teknologi yang terkomputerisasi dan terintegrasi yang didukung oleh aplikasi pendukung modern yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan kinerja karyawan. Berdasarkan penjelasan di atas kecanggihan teknologi dapat diartikan sebagai perangkat teknologi yang terintegrasi dengan sistem yang berbasis komputer serta didukung oleh aplikasi pendukung yang modern yang diharapkan dapat memudahkan aktivitas perusahaan dan kinerja para karyawan. Menurut M.Suryanto (2005: 11) mengenai indikator kecanggihan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Keras Komputer (*hardware*)
2. Perangkat Lunak Komputer (*software*)
3. Jaringan dan komunikasi

4. Database

5. Personalia Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi dalam menunjang sistem informasi membawa pengaruh terhadap hampir semua aspek dalam pengelolaan bisnis atau suatu organisasi, kecanggihan teknologi informasi mencerminkan keanekaragaman jumlah teknologi yang digunakan sedangkan kecanggihan informasi ditandai dengan sifat portofolio penerapannya.

Pengendalian internal merupakan rencana dan cara dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk menjaga kekayaan perusahaan, menghasilkan informasi yang tepat, dan mendorong kepatuhan pada peraturan yang ditetapkan manajemen (Krismiaji, 2010 : 218). Pengendalian Internal diharapkan mampu mendorong efektivitas dan efesiensi penggunaan sumber daya, mencegah timbulnya kerugian karena pemborosan, limbah dan penyalahgunaan aset (Tedi Rustendi 2017:92) Sistem Informasi Akuntansi yang baik harus memiliki pengendalian (Puspitawati, *et al*, 2011 : 222).

Penerapan pengendalian internal di dalam suatu sistem informasi akuntansi digunakan untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Sistem Informasi Akuntansi yang tidak menerapkan pengendalian internal, memiliki kemungkinan bahwa sistem informasi akuntansi tersebut tidak dapat berguna. Salah satu tujuan dari penerapan pengendalian internal yaitu untuk menghasilkan informasi keuangan yang andal dan dapat dipercaya (Diana, *et al*, 2011 : 84).

Pengaruh kecanggihan teknologi informasi berisi tentang hubungan antara faktor dalam aspek perilaku pengguna dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat bervariasi bergantung pada situasi yang ada. Penelitian ini menggunakan teori kontijensi untuk mengevaluasi efektivitas pemanfaatan teknologi informasi yaitu kecanggihan teknologi informasi sebagai sarana pendukung kinerja sistem informasi akuntansi, kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat mempengaruhi sistem informasi akuntansi. Perubahan teknologi berdampak terhadap sistem informasi akuntansi yang diterapkan pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Kecanggihan teknologi informasi mencakup inovasi teknologi baru yang memberikan peluang emas bagi para pengguna dalam membantu meningkatkan efektivitas sistem informasi akuntansi.

Banyak perusahaan yang memakai sistem informasi akuntansi dalam operasi perusahaan namun kinerja sistem informasi akuntansi tersebut tidak memuaskan, seperti pemakaian tidak mengerti cara mengoperasikan sistem tersebut sehingga kinerja sistem informasi tersebut tidak maksimal. Sistem informasi yang tidak sesuai dengan sistem yang beroperasi di perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sistem informasi lebih besar dari pada manfaat yang didapat. Sistem yang dibuat tidak sesuai dengan ukuran perusahaan dilihat dari operasi perusahaan tersebut, seperti sistem informasi yang ada terlalu canggih untuk perusahaan yang kecil sehingga perusahaan dapat mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan sangat besar dimana sebenarnya dengan sistem informasi yang sederhana juga dapat memenuhi kebutuhan sistem informasi perusahaan atau sebaliknya perusahaan yang besar menggunakan sistem informasi yang

sederhana sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sistem informasi perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ratnaningsih dan Suaryana menyatakan bahwa kecanggihan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi.

Dan menurut Gondodiyoto (2007, p.260) dalam buku Implementasi Pada Tata Kelola Sipenyu tujuan pengendalian internal berhubungan dengan teknologi informasi yaitu untuk :

1. Meningkatkan keamanan (*improve security*) aset sistem informasi catatan-catatan akuntansi (*accounting record*) yang bersifat aset logika, maupun aset fisik seperti *hardware* , infrastruktur, dan sebagainya)
2. Meningkatkan integritas data, sehingga laporan yang benar dapat dibuat dengan data yang benar dan konsisten.
3. Meningkatkan efektivitas sistem (*improve sistem effectiveness*)
4. Meningkatkan efisiensi sistem (*improve sistem effeciency*)
5. Membantu manajemen guna mencapai pengendalian internal secara keseluruhan, termasuk kegiatan manual di dalamnya, termasuk pada

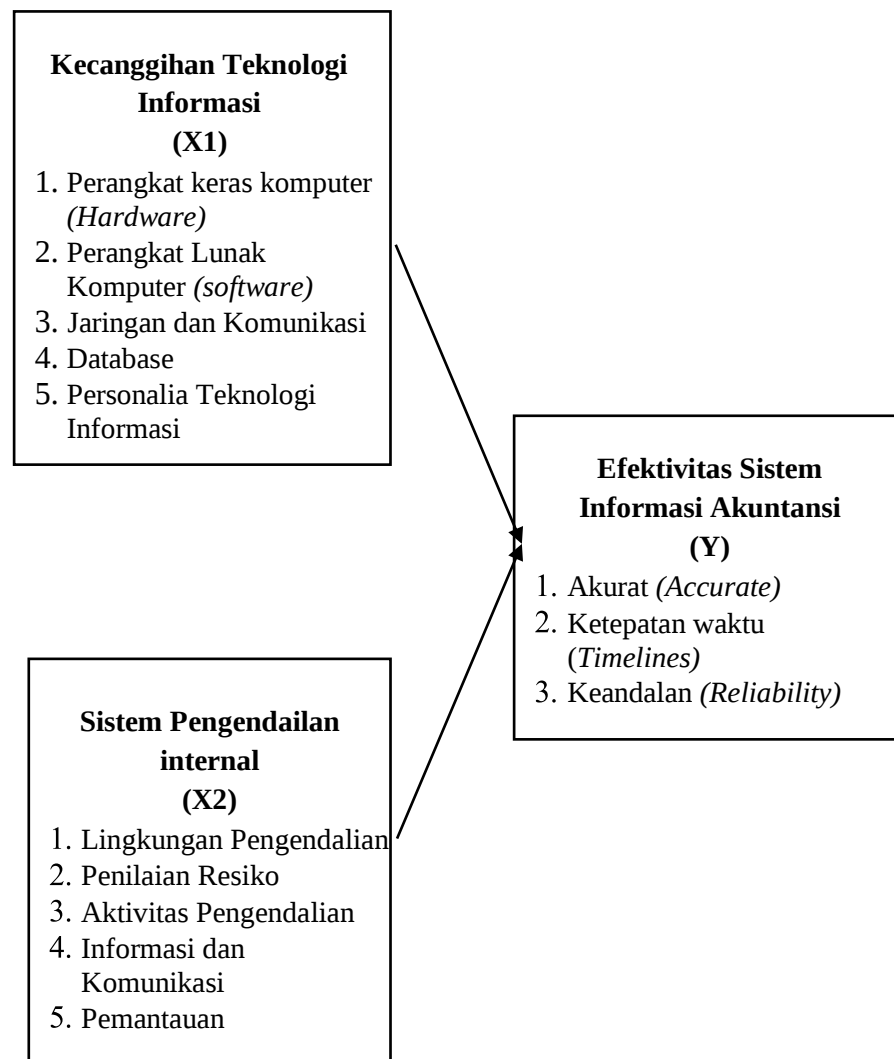
kegiatan dengan alat mekanis, teknologi informasi.

Adanya tujuan pengendalian internal yaitu untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk memastikan aktivitas oprasi perusahaan efektif dan efesien, serta pelaporan keuangan yang andal. Sedangkan dalam aktivitas akuntansi, pengendalian internal adalah bagian

terpenting dalam proses pemeriksaan untuk laporan keuangan, oleh sebab itu adanya pengendalian internal maka transaksi pengelolaan data akan lebih terintegrasi husunya dibidang akuntansi. Menurut Yasmita (2012) pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Azhar Susanto (2016:61), Riri Maryanti (2017:58) dan A. Sintala Kaisar (2017:43) menyatakan bahwa teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi. Kadek Indah R dan I Gusti Ngurah Agung S (2014:11), Erwin (2019 :14) dan Ratu Fauziah Hanum (2021:477) Menyatakan bahwa Kecanggihan Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi

Dari hasil kerangka pemikiran dan juga di dasari oleh penelitian terdahulu maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi akuntansi yang akan diteliti saat ini adalah kecanggihan teknologi informasi dan pengendalian internal, maka model kerangka dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menghubungkan antara variabel satu dengan variabel dan masih bersifat sementara (Anshori, et al, 2019:44). Dikatakan sementara karena jawaban-jawaban yang diberikan hanya baru didasarkan pada teori yang relavan dan belum didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui proses pengumpulan data (Sugiyono, 2016:64).

Berdasarkan teori diatas, maka hipotesis yang telah terbentuk di dalam penelitian ini adalah :

H1 : Terdapat pengaruh kecanggihan teknologi informasi, Sistem Pengendalian internal terhadap efektivitas sistem informasi akuntansi baik secara Parsial dan Simultan.